

## Tantangan organisasi bundo kandung dalam mendorong representasi perempuan di lembaga legislatif Sumatera Barat = Organizational challenges bundo kandung in promoting women s representation in legislative institutions of West Sumatra

Soraya Oktarina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476640&lokasi=lokal>

---

Abstrak

### **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang peran dan tantangan yang di hadapi Organisasi Bundo Kandung Dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah berdampak terhadap berlakunya sistem demokrasi lokal di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang corak kebudayaanya khas, menganut asas matrilineal, perempuan menempati posisi sentral. Peran perempuan Sumatera Barat atau yang dikenal dengan istilah bundo kandung kemudian diperkuat melalui peraturan daerah tentang Pemerintahan Nagari. Bundo kandung tidak hanya sebagai pelestari adat, namun juga memiliki peran politis sebagai penentu kebijakan. Organisasi Bundo Kandung sebagai salah satu kelompok perempuan Minangkabau berupaya mendorong kehadiran perempuan di dalam lembaga kebijakan melalui peningkatan kapasitas perempuan, mulai dari tingkat nagari hingga provinsi. Realitanya, tak sedikit hambatan yang harus dihadapi dalam menghadirkan perempuan di dalam pengambil kebijakan. Kentalnya akulturasi budaya patriarkhi, doktrin agama, hingga adanya dualisme sistem pemerintahan yang berjalan di Sumatera Barat menjadi isu utama. Tak hayal, peran organisasi bundo kandung pun hanya mampu berjalan di tataran substantif seremonial.

---

### **ABSTRACT**

This thesis discusses the roles and challenges faced by Bundo Kandung Organizational in Encouraging Women Representation in Legislative Institutions of West Sumatra. This research is qualitative research with descriptive design. The results of the study explained that the existence of Law No.22 of 1999 which was then revised with Law No.32 of 2004 on Regional Autonomy impacted the enactment of local democratic system in some areas in Indonesia, one of West Sumatra. West Sumatra Province is an area of distinctive culture, adhering to the matrilineal principle, women occupy a central position. The role of women of West Sumatra or known as bundo kandung is then reinforced through the Local Regulation on Nagari Government. Bundo kandung not only as a preserver of adat, but also has a political role as a policy maker. The Bundo Kandung organization, as one of the Minangkabau women s groups, seeks to encourage women s presence in policy institutions through capacity building for women, from the nagari to the provincial levels. Reality, not a few obstacles that must be faced in presenting women in policy makers. The strong acculturation of patriarchal culture, religious doctrine, until the dualism of government system running in West Sumatra became the main issue. Unimaginable, the role of bundo kandung organization was only able to walk in ceremonial substantif level